

JURNAL Kepemimpinan Pendidikan

- | | |
|-------------------------|--|
| Abd. Rahman A. Ghani | Budaya Organisasi Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah |
| Novi Irwansyah Muchdie | Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Iklim Organisasi dan Etos Kerja Guru |
| Ihsana El Khuluqo | Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Berprestasi dan Disiplin Guru |
| Sri Asututi | Implementasi Manajemen Sekolah Inklusif |
| Ruri R. Santosa Murwani | Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Budaya Organisasi dan Kualitas Pelayanan Sekolah |
| Connie Chairunnisa | Kompetensi, Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja Guru |
| Hamis Al Jufri | Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis Komputer dan Kualitas Pelayanan Administrasi |
| Syaiful Anwar | Kualitas Kinerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Daarul Mujaahidin Wilayah Binaan X Kecamatan Pasar Kemis Tangerang Banten |



IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKOLAH INKLUSIF

Sri Astuti

SPs Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mencari format baru dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi, sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam melayani anak berkebutuhan khusus (ABK). Fokus penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi manajemen sekolah inklusif di SDN Klender 03 Pagi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur-DKI Jakarta agar diperoleh hasil optimal dalam melayani anak berkebutuhan khusus" dengan melakukan analisis terhadap manajemen sekolah inklusif, meliputi manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, pembelajaran, penilaian, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan inklusif. Penelitian dilakukan melalui studi kasus bagian dari metode penelitian kualitatif. Sumber informasi adalah kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, masyarakat, orang tua murid dan Komite Sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen dan observasi. Setelah cross check data primer dari literature yang ada, dilakukan konfirmasi. Temuan penelitian dideskripsikan, divalidasi dengan melakukan triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen sekolah inklusif belum efektif, pelayanan pada anak berkebutuhan khusus belum optimal dan tidak sesuai dengan kekhususannya. Penyelenggaraan Manajemen Sekolah Inklusif harus diperbaiki. Sebagai solusi, bidang-bidang dalam manajemen sekolah inklusif agar segera dibenahi sehingga pelaksanaannya menjadi efektif dengan hasil optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menuntutkan wajib belajar dua belas tahun serta mewujudkan pendidikan untuk semua dapat terlaksana.

Kata kunci: *manajemen sekolah inklusif*

IMPLEMENTATION OF SCHOOL MANAGEMENT INCLUSIVE

Abstract. This study was conducted to search for a new format with the aim of improving the implementation of inclusive education management in SDN Klender 03 morning, in order to obtain optimal results in serving children with special needs (ABK). The focus of this research is "How is the implementation of inclusive school management in Klender SDN 03 Pagi, District Duren Sawit-Jakarta in order to obtain optimal results in serving children with special needs" by analyzing the inclusive school management, including student management, curriculum, personnel educators, learning, assessment, financing, infrastructure, and community empowerment in inclusive education. The study was conducted through a case study part of qualitative research methods. The source of information is the principal, teachers, students, the community, parents and the School Committee. Data were collected through interviews, document analysis and observation. After cross-checking primary data from the existing literature, conducted confirmation. The research findings described, validated by triangulation. The findings showed that the implementation of inclusive school management has not been effective, service to children with special needs is not optimal and does not conform with its own peculiarities. Implementation of Inclusive Schools Management should be corrected. As a solution, the areas within an inclusive school management in order to be addressed so that implementation becomes effective with optimal results in improving the quality of education, completing a twelve-year compulsory education and to realize education for all can be accomplished.

Keywords: *inclusive school management*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.. UNESCO dipercaya untuk memimpin upaya-upaya guna menindaklanjuti Kerangka Aksi Dakar. Pendidikan inklusif ditetapkan dalam Konferensi Dunia Salamanca sebagai satu prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar kelompok-kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terkucilkan. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengamanatkan kepada UNESCO untuk memastikan bahwa pendidikan kebutuhan khusus merupakan bagian dari setiap diskusi yang terkait dengan pendidikan untuk semua. Kerangka Aksi mengenai

pendidikan berkebutuhan khusus diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun organisasi-organisasi dalam menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi kehidupan yang bermartabat.

Di Indonesia, memiliki pandangan pada awal penerapan pendidikannya yang menganut pada keyakinan bahwa pendidikan bagi anak normal dan kebutuhan khusus harus dipisahkan. Namun setelah dideklarasikan pendidikan untuk semua, maka dirasa tidak manusiawi bila pendidikan hanya diberikan pada anak normal saja dan menganaktirikan anak-anak cacat. Sedangkan inklusif itu sendiri mengandung pengertian anak-anak yang berkelainan sedikit pada fisik/mentalnya. Maka dengan keyakinan pada semangat education for all maka pendidikan inklusif mulai menjadi alternative pendidikan yang ikut dilaksanakan di Indonesia.

Depdiknas, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2008:23) dalam buku Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Khusus, berdasarkan hasil kajian dan analisis pendidikan terpadu, diketahui bahwa :

- (1) perlu pembekalan asesmen bagi guru tentang kemampuan awal siswa;
- (2) kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru (GPK dan guru regular);
- (3) mengubah kebiasaan guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik ABK;
- (4) melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan kemampuan ABK;
- (5) Prinsip pembelajaran secara umum perlu di tambah, yaitu dengan: prinsip kasih sayang, prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull), prinsip perbaikan berkelanjutan, prinsip menghargai perbedaan;
- (6) Perlu pemahaman bagi

guru tentang: pengelolaan kelas dengan ABK di kelas regular, aturan penilaian untuk ABK, dan kegiatan tindak lanjut atau ketuntasan belajar ABK.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Praptono (2011:33) menyatakan bahwa pertama, kondisi adaptasi sekolah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh budaya sekolah. Penerimaan teman dalam kegiatan belajar kelompok masih harus diperhatikan oleh guru. Aspek yang harus diperhatikan adalah penerimaan kepala sekolah dan teman-teman non ABK terhadap ABK serta kebijakan sekolah dalam mewujudkan kebersamaan.

Simpulan penelitian Terry Irenewaty dan Aman (<http://www.scribd.com/doc/52167705>): tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung pada kesediaan sekolah itu sendiri, bila sekolah merasa siap dan mampu menyelenggarakannya. Dinas pendidikan atau pemerintah tidak pernah memaksakan sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY adalah sebagai sentra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa di kelas inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen.

Dikatakan bahwa kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusi ada empat. Pertama, kendala-kendala yang bersifat praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana prasarana, dan kondisi geografis, saranaprasarana, dan kondisi keungan. Kedua, yaitu psikologi baik

dari masyarakat maupun guru. Ketiga, value yaitu penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keempat, power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi keberbagai daerah mengenai pendidikan inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kelainan (cacat).

Sesuai dengan konteks tersebut di bagian atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan efektifitas pelaksanaan manajemen kesiswaan sekolah inklusif di SD Negeri Klender 03 Pagi agar hasilnya optimal?
2. Bagaimanakah pengembangan manajemen kurikulum agar sesuai dengan keutuhan karakteristik anak berkebutuhan khusus pada SD Negeri Klender 03 Pagi?
3. Bagaimanakah meningkatkan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan agar penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SD Negeri Klender 03 Pagi menjadi optimal?
4. Bagaimanakah meningkatkan manajemen pembelajaran pada strategi belajar mengajar pada SD Negeri Klender 03 Pagi agar sangkil dan mangkus?
5. Bagaimanakah meningkatkan manajemen penilaian pada model pendidikan inklusi di SD Negeri Klender 03 Pagi agar peserta didik

- mendapatkan penilaiannya disesuaikan dengan kekhususannya?
6. Bagaimanakah meningkatkan manajemen pembiayaan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar semua kegiatan di SDN Klender 03 Pagi dapat berjalan dengan baik?
 7. Bagaimanakah meningkatkan manajemen pengelolaan sarana prasarana pada model pendidikan inklusi di SD Negeri Klender 03 Pagi?
 8. Bagaimanakah meningkatkan manajemen pemberdayaan masyarakat agar dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi SD Negeri Klender 03 Pagi menjadi semakin besar?

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di tingkat satuan pendidikan dasar yaitu Sekolah dasar Negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Administrasi Jakarta Timur yakni SD Negeri Klender 03 Pagi Kecamatan Duren sawit Kodya Jakarta Timur DKI Jakarta. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Oktober 2012 sampai April 2013.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan strategi studi kasus. Secara teknis peneliti akan hadir pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri Klender 03 Pagi, Jakarta Timur. Baik dalam konteks kegiatan di dalam maupun diluar kelas. Peneliti juga melakukan pengamatan dan wawancara secara intensif serta mengambil data melalui dokumentasi yang didapat dari Kepala Sekolah, Guru dan orang tua siswa, baik berupa hard copy, buku maupun foto.

Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung dan setelah peneliti mendapatkan catatan-catatan kegiatan yang terjadi pada latar,

dilanjutkan dengan kegiatan analisis awal dari hasil temuan di lapangan. Dengan tujuan agar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu penelitian dapat segera dicatat dengan mengingat kembali kegiatan yang telah terjadi sebagai tambahan informasi dalam langkah analisis. Selanjutnya, peneliti mengadakan kegiatan pencatatan sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menguji kevalidan data yang diperoleh, peneliti melakukan cek data yang telah melalui beberapa sumber. Seperti dari kepala sekolah, fasilitator, maupun orang tua siswa. Dengan maksud agar peneliti mendapat kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*).

Dalam teknik analisis data, peneliti membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Bila permasalahan yang diteliti belum terjawab atau belum lengkap, maka peneliti akan melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Dalam memperoleh derajat kepercayaan, penulis juga melakukan triangulasi data. Triangulasi merupakan verifikasi penemuan di lapangan melalui informasi sumber dengan berbagai cara, dan waktu.

Untuk Triangulasi data sumber cara pengecekan data yang sudah diperoleh, dari: kepala sekolah, guru dan orang tua siswa atau siswa. Ke tiga sumber dideskripsikan, dikategorikan dalam pandangan yang sama, berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang sudah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan kesepakatan melalui *member check* dengan tiga sumber data tersebut.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data

1. Latar Penelitian SDN Klender 03 Pagi berada di Jalan Radin Inten,

Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur- DKI Jakarta, berakreditasi A. Berdiri dan beroperasi pada tahun 1980 dengan status tanah SHM/HGB di atas tanah seluas 2742 m2 dan luas bangunan 563,5 m2.

Secara geografis SDN Klender 03 Pagi mudah dijangkau dari berbagai wilayah, baik dari Cakung, Jatinegara, Duren Sawit, maupun wilayah Pondok Kopi karena letaknya yang strategis di pinggir jalan Radin Inten.

Lingkungan SDN Klender 03 Pagi mendukung untuk mengembangkan pengalaman belajar peserta didik baik pengembangan akademik maupun non akademik. Di sekitar SDN Klender 03 Pagi terdapat SMP Negeri 255 (RSBI), Gedung Senam, Puskesmas, Masjid, Arena Futsal, SMK Negeri 48 dan Kantor Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Duren Sawit. Posisi yang berdekatan dengan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial ini dapat memudahkan peningkatan kreativitas belajar peserta didik baik siswa normal maupun berkebutuhan khusus.

Saat ini SDN Klender 03 Pagi memiliki bangunan sekolah yang terdiri atas 8 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 unit ruang computer, 1 unit ruang UKS, 1 bangunan masjid, 4 unit WC yang terdiri atas 1 unit WC siswa perempuan yang terdiri atas 2 ruang, 1 unit WC siswa laki-laki yang terdiri atas 2 ruang, 1 unit WC guru perempuan dan 1 unit WC guru laki-laki.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah, SDN Klender 03 Pagi berpedoman pada visi dan misi sekolah. Visi SDN Klender 03 Pagi, visi SDN Klender 03 Pagi adalah "Mengutamakan pendidikan jasmani dan rohani agar tercipta calon SDM yang mandiri, taqwa, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan

berkreatifitas, peduli terhadap lingkungan serta berwawasan budaya".

SDN Klender 03 Pagi memiliki sejumlah prestasi baik di tingkat kecamatan, sampai ke tingkat nasional. Adapun prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SDN Klender 03 Pagi, yaitu: galang aksi, belajar bermain, basket dan, gerak jalan PGRI.

Tingkat kelulusan dan siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam 3 tahun terakhir mencapai 100%, dan hasil perolehan Nilai Ujian Akhir Nasional atau Nilai Ujian Nasional dalam tiga tahun terakhir adalah:

Tabel 1
Nilai Ujian Akhir Nasional Tiga Tahun Terakhir

	Tahun Pelajaran	Bahasa Indonesia	Matematika	IPA
1	2009/2010	7,47	7,85	7,67
2	2010/2011	7,27	7,67	7,35
3	2011/2012	7,33	7,85	7,66

Sumber: Dokumen sekolah tahun ajaran 2011/2012

2. Sejarah Pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi dimulai pada tahun 2009 ketika ditunjuk provinsi DKI Jakarta sebagai piloting project pengembangan pendidikan inklusif, yang melibatkan 117 sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke SMA/SMK yang tersebar di 5 wilayah Kota di DKI Jakarta. Penunjukan sebagai sekolah inklusif ini sebagai pengejawantahan surat edaran Ditjen Dikdasmen Nomor 238/C.C6/MN/2003 yang menyatakan bahwa di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya terdapat empat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada

setiap tingkat satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA/SMK).

Penunjukkan SDN Klender 03 Pagi sebagai sekolah inklusi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tahun 2009, namun penguatan sekolah ini menjadi sekolah inklusi baru tahun 2012 dengan diterbitkannya SK. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Sekolah SDN Klender 03 Pagi (wawancara Rabu, 16 Januari 2013) : Pada tahun 2009, sekolah kami ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Program Inklusi (SPPI) dan baru tahun 2012 keluar surat keputusan yang menunjukkan sekolah kami sebagai sekolah inklusif.”

Sejak tahun 2009 konsep pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh SDN Klender 03 Pagi hingga sekarang, hampir 4 tahun berlangsung. Sedangkan sosialisasi tentang pendidikan inklusif baru ditegaskan pada tahun ajaran baru 2010/2011 ketika penerimaan siswa baru (PPDB), pada tahun ajaran tersebut SDN Klender 03 Pagi resmi menerima siswa berkebutuhan khusus.

Hasil Analisis Data

1. Sub fokus 1 : Identifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus

a. Indikator nomor 1: Terjaringnya informasi pelaksanaan identifikasi ABK.

Hasil penelitian pada indikator identifikasi/assesmen dilakukan berdasarkan kebijakan sekolah, terlihat dari tidak digunakannya alat identifikasi siswa ABK dan tidak adanya keterlibatan guru pendamping khusus (GPK) pada proses identifikasi awal siswa berkebutuhan khusus baru. SDN Klender 15 Pagi diketahui telah melakukan assesmen terhadap anak berkebutuhan khusus ketika penerimaan siswa pada tahun ajaran baru maupun saat menerima siswa pindahan, walaupun alat identifikasi ABK tidak digunakan juga tidak dilakukan oleh

tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya. Penerimaan siswa baru didasarkan pada wawancara oleh guru panitia PPDB dan keputusan penerimaannya berdasarkan pertimbangan nurani.

Animo masyarakat mendaftarkan ABK ke sekolah ini tetap tinggi dikarenakan perhatian guru terhadap ABK yang menangani ABK dengan kasih sayang, dan sekolah ini terlihat sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebenarnya di kelurahan Klender ini ada SDN Klender 17 Petang yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tetapi sekolah ini tidak lagi dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus karena sudah digabung dengan SDN Klender 12 Pagi, SDN Klender 12 Pagi merupakan sekolah dasar negeri regular tanpa label sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, maka SDN Klender 12 Pagi merasa tidak perlu melanjutkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolahnya.

b. Indikator nomor 2 : Terjaringnya informasi karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Klender 03 Pagi.

Hasil penelitian pada indikator ini ABK yang bersekolah di sekolah ini adalah ABK yang layak didik, dapat dilihat dari tidak terdapatnya peserta didik yang mengalami hambatan berat dalam kekhasannya, dengan kata lain ABK tersebut memang pantas disekolahkan pada sekolah inklusif daripada mereka bersekolah di SLB.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa sebagian besar ABK di SDN Klender 15 Pagi merupakan peserta didik berkebutuhan khusus yang layak didik, terdiri dari 1 orang anak mengalami gangguan pendengaran, 7 orang lambat belajar, 1 orang gangguan pemusatan perhatian, 1 orang berkesulitan belajar, dan 1 orang

mengalami gangguan pada pengelihatannya. Tidak ada anak yang mengalami autisme ringan, hiperaktif (ADHD) berat, tunagrahita ringan, ataupun siswa dengan autisme berat.

Bila demikian, peserta didik tersebut memang sebaiknya belajar di sekolah inklusif bukan ke SLB. Seperti yang dikatakan oleh orang tua siswa ABK ketika wawancara dengan ibu Rina orang tua dari anak hiperaktif Raihan, siswa kelas I pada hari Jumat, 27 Januari 2013 : “sebetulnya saya ingin mendaftar ke SLB tetapi dokter yang menangani kembang tumbuh anak saya menganjurkan untuk mencoba mendaftar ke sekolah reguler, dan Alhamdulillah diterima.”

Anak berkebutuhan khusus yang ada di SDN Klender 03 Pagi merupakan ABK yang berkesulitan belajar, kesulitan konsentrasi, dan tuna grahita ringan. Walau ada anak yang memiliki kelemahan fisik namun memiliki kecerdasan relative sama dan dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak seusianya di sekolah inklusif.

2. Sub Fokus 2: Manajemen Kurikulum

a. Indikator pertama : teridentifikasinya proses penyusunan kurikulum di sekolah inklusif.

Dari penelitian pada indikator ini diketahui bahwa kurikulum yang digunakan masih sama dengan yang diterapkan pada siswa reguler, ditandai dengan tidak ada modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK, juga pada penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) bagi ABK yang tidak dilaksanakan.

Sekolah penyelenggara inklusi merupakan penyelenggara pendidikan yang tidak membedakan peserta didik. Tetapi karena pada sekolah inklusif terdapat peserta didik yang memerlukan penggunaan sarana, media, dan strategi dalam proses belajarnya, sudah barang tentu diperlukan modifikasi kurikulum

yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK, termasuk juga penyusunan Program Pengajaran Individu (PPI) bagi ABK.

Pada umumnya sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga pada proses belajar mengajar di sekolah inklusif tidak berbeda dengan proses belajar mengajar di sekolah reguler. Dengan demikian maka kurikulum yang digunakan sama, dan proses penilaiannya juga sama. Hampir-hampir tidak tampak perbedaan proses pembelajaran di sekolah inklusif dengan di sekolah reguler atau umum lainnya. Di SDN Klender 03 Pagi tidak memiliki guru pembimbing khusus, sehingga sekolah tersebut belum membuat Program Pengajaran Individual (PPI), itu artinya kurikulum yang dipakai disamakan untuk semua peserta didik.

Modifikasi kurikulum pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan pedoman yang seharusnya. Hal ini diawali dengan tidak adanya Program pengajaran Individual (PPI). Meskipun sekolah menyatakan mengurangi materi atau memodifikasi, dasarnya bukanlah asesmen yang dituangkan dalam PPI. Dasarnya lebih pada perkiraan pihak sekolah atau guru. Pada kenyatannya terjadi juga pengurangan bobot nilai bagi ABK tertentu.

b. Indikator nomor 2 : Teridentifikasinya model kurikulum yang dipakai pada kelas inklusif

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan Silabus dan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) yang digunakan di sekolah SDN Klender 03 Pagi sama dengan sekolah dasar pada umumnya. Artinya sebagian besar guru-guru di sekolah inklusif hampir tidak pernah membedakan RPP bagi peserta didik normal dan bagi ABK. Seperti

yang disampaikan guru kelas III yang mengatakan hanya menyusun satu RPP yang dipakai untuk semua murid di kelas mereka. Meskipun RPP disamakan namun pada pelaksanaannya, bagi ABK menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan pada peserta didiknya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dimungkinkan memakai tiga model kurikulum. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum umum, kurikulum modifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan. Implikasi dipakainya ke tiga model kurikulum ini pada proses pembelajaran memungkinkan terjadi : (1) guru menggunakan kurikulum umum bagi semua anak, dan (2) guru menggunakan dua model kurikulum, yaitu model umum bagi peserta didik non ABK dan kurikulum modifikasi atau kurikulum yang diindividualisasikan bagi ABK.

Kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang digunakan sekolah reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan serta karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilaksanakan dengan memodifikasi alokasi waktu atau materi. Manajemen kurikulum diantaranya dapat dilakukan melalui: (a) menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, (b) menyusun silabus, (c) menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran.

Pada dasarnya sekolah telah memahami bahwa penyusunan kurikulum adalah hak otonomi sekolah dan sepenuhnya diberikan kepada kepala sekolah masing-masing yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sehingga sangat mungkin setiap sekolah memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya. Adapun alasan mengapa SDN Klender 03 Pagi ini memakai kurikulum

yang sama dengan sekolah umum dimana guru di sekolah inklusif ini tidak menyusun silabus dan RPP yang secara khusus diperuntukkan bagi ABK karena guru-guru di sekolah ini tidak memiliki kompetensi dalam menyusun rencana pembelajaran individual, tidak mempunyai guru pembimbing khusus (GPK) yang membantu merancang dan menyusun kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, dan tingkat kekhususan ABK di sekolah ini tidak terlalu berat sehingga tidak perlu melakukan modifikasi kurikulum.

c. Indikator 3 : terhimpunnya informasi keterlaksanaan kurikulum

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan ketuntasan kurikulum telah disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik (ABK), guru, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan begitu guru dapat menentukan kriteria ketuntasan belajar berbeda bagi siswa reguler dan juga ABK di kelas yang sama. Sehingga pada akhir proses pembelajaran seluruh siswa dapat menuntaskan pembelajaran mereka.

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif berpatokan pada standar isi (SI) dan standar kompetensi kelulusan (SKL) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian standar isi yang digunakan di sekolah SDN Klender 03 Pagi sama dengan standar isi yang digunakan di sekolah umum.

SDN Klender 03 Pagi menetapkan kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam satu kompetensi dasar berkisar antara 0 – 100%. Kriteria ideal untuk setiap indikator lebih besar dari 60%. Tetapi sekolah boleh menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, dalam kisaran 50%, 60%, 70% atau 80%. Penetapan kriteria ini perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, guru, dan

ketersediaan sarana prasarana. Dengan demikian guru dapat menentukan criteria ketuntasan belajar berbeda bagi peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas yang sama. Sehingga pada akhir proses pembelajaran semua peserta didik dapat menuntaskan program pembelajarannya.

Untuk hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Klender 03 Pagi belum dapat diketahui karena belum ada ABK yang mengikuti Ujian Nasional. Hal itu dikarenakan belum ada peserta didik berkebutuhan khusus yang mencapai kelas VI.

3. Sub Fokus 3 : Manajemen Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

a. Indikator 1 : Terhimpunnya informasi mengenai ketersediaan guru di SDN Klender 03 Pagi

Dari hasil penelitian pada indikator ini diperoleh informasi bahwa ketersediaan guru pendidikan khusus di SDN Klender 03 Pagi sangat kurang ditandai dengan tidak adanya guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa dan tidak terdapatnya guru pembimbing khusus (GPK). Inilah kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini.

Tidak adanya pengajar berlatar belakang pendidikan khusus menjadi salah satu kendala utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi sehingga tidak dapat melayani peserta didik dengan optimal. Di sekolah ini tidak terdapat guru berlatar belakang pendidikan khusus, terdapat 14 guru dengan latar belakang S1 tetapi bukan berlatar pendidikan khusus, 1 orang berlatar belakang S2. Dan tidak ada guru pembimbing khusus yang dapat sumbang saran dan membimbing guru-guru di sekolah ini menyusun program pembelajaran ataupun mendampingi ABK dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui komposisi data pendidik di

SDN Klender 03 Pagi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Tenaga Pendidik SDN Klender 03 Pagi
Tanggal 28 Februari 2013

No	Pendidikan	Guru Teta p (PN S)	Guru Tida k Teta p	Jumlah	Ket.
1	S2	1		1	
2	S1	8	6	14	
3	D2				
4	Sarmud/D3				
5	SMA				
6	Guru Pembimbing Khusus				Tidak ada
Jumlah		9	6	15	

Tidak ada guru berlatar belakang khusus juga tidak adanya guru pembimbing khusus membuat sekolah ini tidak berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah non inklusif.

Berdasarkan petunjuk Direktorat Pembinaan SLB setiap sekolah inklusif memerlukan GPK. Setiap sekolah inklusif disarankan bekerjasama dengan SLB terdekat untuk membantu membimbing ABK disekolahnya. Kenyataan di lapangan tidak terjadi kerjasama tersebut.

Pada tahun 2009 adalah awal sosialisasi sekolah inklusif, pemerintah menetapkan sekolah pendamping bagi SDN Klender 03 Pagi, yaitu SLB Asih Budi – Menteng. Namun MoU yang ditandatangani tersebut hingga saat ini baru sebatas MoU. Harapan dari ditandatanganinya MoU tersebut seperti adanya kunjungan dari guru SLB Asih Budi ke SDN Klender 03 Pagi hingga saat ini tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena antara sekolah inklusif dan SLB pendamping tidak memahami arti kerja sama dan wujud atau implementasi kerjasama itu seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, dan

seperti apa naskah kerja sama yang bisa dijalin.

Sekolah inklusif yang memiliki GPK tentunya lebih siap melaksanakan program sekolah inklusif. Keberadaan GPK di sekolah inklusif pada akhirnya tergantung pada kebijakan kepala sekolah yang bersangkutan.

b. Indikator nomor 2 : Terjaringnya informasi kesiapan para guru dalam mengajar di sekolah inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dasar inklusif ini cukup baik. Guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif terhadap keberadaan ABK, walaupun pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing ABK dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sehingga kadang mereka tidak mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

SDN Klender 03 Pagi adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mulanya merupakan sekolah umum. Tetapi SDN Klender 03 Pagi berusaha menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolahnya dengan sungguh-sungguh, karena tenaga pendidik di sekolah ini beranggapan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini merupakan tuntutan profesi yang harus dilaksanakan dengan ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan keinginan membantu pendidikan untuk sesama. Seperti disampaikan oleh kepala SDN Klender 08 Pagi, Ibu Isti Wahyu Widayanti, S.PdI pada wawancara tanggal 16 Januari 2013 : "pendidikan inklusif di sekolah ini dapat berjalan dengan baik karena guru-guru SDN Klender 03 Pagi mau, bersedia, dan benar-benar melakukannya dengan tulus." Kesemua itu akan terjadi bila guru telah mengajar dengan menggunakan nurani sebagai modal

dasar. Maksudnya, penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah membutuhkan upaya lain bukan hanya sekedar aspek legal melainkan aspek norma (nilai) dalam implementasi sehari-hari.

4. Sub Fokus 4 : Manajemen Pembelajaran

a. Indikator nomor 1 : Diperolehnya informasi tentang proses pembelajaran di sekolah inklusif.

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah inklusif ini benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dapat dilihat dari dilaksanakannya kegiatan belajar secara bersama-sama antara peserta didik normal dan yang berkebutuhan khusus.

Tidak ditemukan implikasi sosial pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi terhadap peserta didik reguler dan yang berkebutuhan khusus. Semua anak yang ditemui mengatakan senang bergaul dengan teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti yang di sampaikan ibu Euis selaku orang tua dari peserta didik normal di SDN Klender 03 Pagi, "anak-anak bermain dengan gembira dan mereka tidak memperlakukan perbedaan. Malah mereka seperti tidak merasakan perbedaan".

Hakikat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran di kelas yang melibatkan sejumlah ABK di kelas. Mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh mutu kegiatan pembelajaran, dan hampir seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah penyelenggara inklusif mengikuti proses pembelajaran sekolah reguler.

Ketika peserta didik baru masuk ditahun awal pelajaran kadang ditemukan anak yang belum menerima keberadaan anak yang berbeda dengan diri dan teman-teman lainnya. Anak

berkebutuhan khusus menjadi perhatian anak lainnya yang menyebabkan proses belajar dan mengajar agak terganggu. Setelah proses sosialisasi dan pemberian pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus serta memberi pemahaman bahwa mereka juga berhak mendapat pendidikan, proses pembelajaran berjalan normal dan anak-anak mulai dapat saling menerima dan menghargai sesamanya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa peserta didik di sekolah inklusif mempunyai kemampuan yang beragam, sebab peserta didik di sekolah penyelenggara inklusif terdiri dari bukan hanya anak-anak yang normal juga terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. peserta didik berkebutuhan khusus ini pun memiliki keragaman kelainan baik fisik, intelektual, social, dan atau emosional. Pendidikan inklusif merupakan bentuk sistem pendidikan yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan oleh karena itu strategi pembelajarannya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Pelaksanaan strategi pembelajaran yang bervariasi ini berdampak pada penyiapan jumlah, kualifikasi, sertifikasi tenaga pendidik dan juga biaya.

b. Indikator nomor 2 : Diperolehnya informasi tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator ini diketahui bahwa strategi guru mengajar ABK bisa dikatakan kurang disesuaikan dengan kekhususan ABK, ditandai dengan ABK lebih banyak menerima strategi pembelajaran yang sama dengan siswa reguler. Bilapun ada perhatian akan kekhususannya seperti strategi pembelajarannya khusus, masih minim

diterima ABK dan sedikit saja yang dilakukan oleh guru.

Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa sekolah mengajar dengan strategi yang sama untuk ABK dan reguler. Meskipun pada beberapa saat guru terlihat memberikan perhatian khusus, seperti duduk di samping ABK, membantu atau membujuk ABK, secara umum tak ada beda yang signifikan ataupun cara khusus yang dikembangkan guru untuk strategi mengajar ABK yang sesuai dengan kebutuhan ABK.

Di sekolah ini, guru tidak memperkenankan orang tua untuk membantu proses pembelajarannya di kelas. Karena khawatir kehadiran orang tua di dalam kelas mengganggu konsentrasi peserta didik yang lain.

Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SDN Klender 03 Pagi tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sehingga proses pembelajaran di sekolah inklusif ini hampir tak ada perbedaan dengan proses pembelajaran di sekolah umum. Dengan kata lain kurikulum yang digunakan, materi yang disampaikan kepada peserta didik, metode yang digunakan, maupun proses penilaian pada sekolah penyelenggara inklusif sama dengan sekolah umum.

SDN Klender 03 Pagi belum membuat PPI, artinya kurikulum yang digunakan disamakan untuk semua siswa. Peserta didik-peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak didampingi oleh guru bayangan atau shadow teacher. Guru kelas sepenuhnya menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus ini dikelasnya. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak menyediakan guru pendamping mengingat biaya mengadakan guru pendamping biayanya cukup tinggi.

5. Manajemen Penilaian

Indikator : terjaringnya evaluasi hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Dari hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan berdasarkan pertimbangan guru. Hal ini dapat dilihat dari ketidakadaan standar khusus yang mengatur ini. Walaupun bentuknya mirip, bobot penilaiannya maupun standar penilaiannya, bagi peserta didik berkebutuhan khusus diturunkan dengan dasar pertimbangan kemanusiaan atau agar peserta didik berkebutuhan khusus tidak tinggal kelas.

Pada pembebanan tugas yang diberikan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik normal tetapi dinilai dengan standar yang berbeda. Alasan dilakukan menyamakan pemberian tugas untuk penyesuaian. Meskipun demikian penyesuaian yang dilakukan tidak berdasarkan pada kebutuhan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yang seharusnya disusun dalam Perencanaan Pembelajaran Individu (PPI). Sehingga hal yang dilakukan oleh sekolah ini masih belum dikatakan tepat.

Evaluasi belajar yang dilakukan oleh sekolah pada umumnya merujuk pada evaluasi yang standard an dilakukan untuk peserta didik pada sekolah reguler. Sesuai dengan lampiran Permendiknas bahwa, kriteria penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak sama dengan peserta didik normal. Peserta didik berkebutuhan khusus relative mendapatkan kemudahan nilai dengan pertimbangan kemanusiaan.

6. Sub Fokus 6 : Manajemen Pembiayaan

a. Indikator nomor 1 : Terjaringnya informasi tentang sumber pembiayaan pendidikan inklusif

Hasil penelitian yang dilakukan pada indikator ini menunjukkan sekolah

kekurangan dana dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, ditandai dengan minimnya dana untuk memenuhi pengadaan sarana prasarana khusus dan biaya operasional tambahan, seperti pengadaan alat identifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, alat peraga khusus seperti alat bantu belajar bagi ABK, alat-alat kesenian, dan sosialisasi sekolah inklusif.

Dalam pembiayaan pendidikan, SDN Klender 03 Pagi membenarkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan biaya tambahan bila dibandingkan penyelenggara pendidikan umumnya. Biaya yang dibutuhkan adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan alat-alat bantu atau media pembelajaran khusus, dan gaji atau honor tenaga pendidik khusus (baca guru pembimbing khusus:GPK), serta lain sebagainya.

Dari realisasi dana APBS keseluruhannya digunakan untuk biaya rutin (*recurrent cost*) yang dikeluarkan oleh sekolah. Biaya-biaya rutin tersebut antara lain untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan dalam satu tahun anggaran. Biaya rutin dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru honorer dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan satana dan prasarana.

Sumber pembiayaan untuk tahun anggaran 2012/2013 berasal dari APBN, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari APBD, yaitu Bantuan Operasional Pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, telah dialokasikan sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Bantuan tidak mengikat ini dapat diperoleh dari orang tua peserta didik, donator-donatur, lembaga non pemerintah, dan lain lain.

S u m b e r p e n d a n a n penyelenggaraan pendidikan inklusif di

sekolah dapat berbeda dengan sekolah lain baik dengan sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pada sekolah negeri pendanaan penyelenggaraan berasal dari pemerintah, baik dari pemerintahan tingkat provinsi dan kontribusi dari orang tua atau masyarakat. Sedangkan pendanaan pada sekolah swasta sepenuhnya berasal dari kontribusi orang tua peserta didik. Sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama baik negeri maupun swasta mendapat bantuan yang sama dari pemerintah pusat berupa dana bantuan operasional sekolah, yang di singkat BOS.

Kontribusi orang tua pada sekolah inklusif sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah inklusif. Mengingat keberagaman latar belakang baik pendidikan maupun tingkat ekonomi orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, maka kontribusi orang tua tidak diberlakukan sama rata. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan orang tua ABK yang bersangkutan. Jadi bisa saja ditemukan ada orang tua ABK yang memberi kontribusi yang lebih besar pada sekolah, dan boleh jadi ditemukan pula orang tua ABK yang tidak memberikan kontribusi apa pun kepada sekolah. Kondisi seperti ini lumrah terjadi di sekolah negeri.

7. Sub Fokus 7 : Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Indikator Sub Fokus 6 : Terjaringnya informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif belum memadai, dapat diketahui dari tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus penyelenggaraan sekolah inklusif baik untuk peralatan untuk assesmen ABK baru maupun alat bantu pembelajaran siswa ABK.

Di SDN Klender 03 pagi tidak mempunyai prasarana khusus berupa ruangan khusus bagi pembinaan ABK, begitupun dengan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti bangku, meja dan alat-alat yang diperlukan. Padahal ruangan khusus ini dibutuhkan guna melakukan pembinaan ABK dan atau sebagai ruang terapi bagi ABK.

SDN Klender 03 Pagi tidak mempunyai ruang terapi yang dapat dipakai untuk berbagai macam terapi, misalnya terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi individu. Sedangkan untuk jenis-jenis terapi lainnya dapat dilakukan di ruangan atau tempat lain, seperti terapi bermain, terapi perilaku, dan terapi fisik. Tempat yang digunakan untuk terapi-terapi tersebut bisa dilakukan di lapangan atau ruang terbuka lainnya. Sementara untuk terapi wicara, terapi individu atau terapi okupasi, SDN Klender 03 Pagi menggunakan ruang UKS yang sering beralih fungsi menjadi ruang terapi bagi ABK.

Selain ruang khusus, pada sekolah inklusif perlu terdapat ruang sumber. Pada ruang ini terdapat berbagai sumber dan media belajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran bagi ABK. Sumber dan media khusus yang dipakai di sekolah disesuaikan dengan keperluan dari setiap ABK.

Sarana atau media khusus yang dipakai baik sebagai media pembelajaran atau sebagai sarana penunjang pembelajaran. Tetapi SDN Klender 03 Pagi tidak mempunyai ruang khusus dan atau ruang sumber.

Alat assesmen adalah alat penting yang semestinya dimiliki oleh setiap sekolah inklusif. Alat ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik ABK yang mendaftar di sekolah ini. Sekarang untuk setiap jenis kekhususan telah tersedia alat asesmennya, misalnya alat assesmen bagi anak yang kesulitan dalam bidang penglihatan, alat asesmen

bagi anak yang mengalami kesulitan pendengaran, alat asesmen bagi anak berkesulitan belajar, dan sebagainya. Hasil dari pelaksanaan asesmen ini selanjutnya dipakai sebagai patokan untuk menentukan program pembelajaran bagi setiap ABK.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang variatif berdampak pada ketersediaan sarana terutama untuk menunjang peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Untuk itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mempersiapkan sarana sesuai dengan kekhususan ABK. Dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh direktorat pembinaan SLB, kebutuhan sarana meliputi peralatan, sumber belajar, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan sarana maupun prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu sekolah inklusid dianggap mahal bagi sebagian orang. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan salah satu tempat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang memberikan perlakuan secara proposional dari semua unsur yang terlibat didalamnya.

Umumnya jenis ABK yang ada di sekolah inklusif adalah ABK yang memiliki kesulitan belajar, kesulitan konsentrasi, anak autis, dan atau tunagrahita ringan. Selain itu anak yang mempunyai kelemahan fisik tetapi memiliki kecerdasan relatif sama dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak normal seusianya di sekolah inklusif, seperti anak tunanetra dan tunadaksa. Namun, bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan atau tingkat kekhususan tinggi seperti tunarungu, tunagrahita berat, tunaganda, dan anak dengan tingkat kesulitan belajar tinggi

lainnya belum dapat mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.

8. Sub Fokus 8 : PEMBERDAYAAN Masyarakat

a. Indikator nomor 1 : Teridentifikasinya peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada indikator ini diketahui bahwa peran orang tua ABK dalam membantu proses belajar mengajar di SDN Klender 03 Pagi sudah cukup baik, ditandai dengan keikhlasan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dalam membawa dan memeriksakan buah hatinya ke psikolog atau psikiatri sehingga guru kelas mendapat informasi yang tepat mengenai peserta didik erkebutuhan khusus ini.

Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa telah terjadi perkembangan sikap positif dan saling menghargai antara orang tua dan sekolah, saling kerja sama, terjalannya komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah dibuktikan dengan adanya interaksi dimana kepala sekolah atau guru memanggil orang tua peserta didik ketika peserta didik mengalami masalah di sekolah, demikian pula sebaliknya orang tua/wali siswa akan memberitahukan kepada wali kelasnya bila anaknya ada permasalahan di rumah. Komunikasi yang terjadi bisa menggunakan media dan alat apa pun. Dibuktikan melalui dokumen surat-surat pemanggilan yang diarsipkan sekolah, buku penghubung yang dimiliki oleh peserta didik yang dijadikan sarana komunikasi antara orang tua dan guru bila ada tugas-tugas atau informasi yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah.

b. Indikator nomor 2 : Terhimpunnya informasi tentang pemahaman

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman masyarakat sekitarnya mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi amat beragam, terlihat dari sikap pro dan kontra terhadap pelaksanaan system pendidikan inklusif. Tanggapan dari masyarakat yang pro muncul karena mereka sadar bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sedangkan tanggapan masyarakat yang kontra lebih pada kurangnya pemahaman mereka mengenai sekolah inklusif, beranggapan sekolah belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas; dan sekolah khusus.

Kemampuan kepala sekolah dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi kepada stake holder-nya membuat sekolah ini tidak kekurangan peminat. Kemampuan guru dalam mengkondisikan peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga terjalin komunikasi dan interaksi yang harmonis menambah nilai lebih bagi sekolah inklusif ini. Peserta didik yang mendaftar ke sekolah ini tak sepi peminat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mendaftar di SDN Klender 03 Pagi melebihi kapasitas dan kuota bangku yang disediakan sekolah selalu terisi penuh.

Peserta didik yang mendaftar cenderung meningkat, hanya saja karena system Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara On Line Real Time maka peserta didik yang diterima memenuhi kuota bangku yang disediakan sekolah.

Sejauh ini hampir tidak ditemukan implikasi sosial dari pelaksanaan

pendidikan inklusif di sekolah terhadap peserta didik reguler dan ABK di sekolah inklusif. Semua siswa yang ditemui peneliti menyatakan senang bergaul dengan teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus.

Persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus tergantung pada ada tidaknya anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus dan pengetahuan yang menyeluruh tentang pendidikan inklusif.

Perlu usaha yang serius agar dapat mensosialisasikan system pendidikan inklusif ini pada semua lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan/ atau kelompok-kelompok masyarakat juga penting guna membantu pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam membangun atmosfir pendidikan inklusif, dibutuhkan hubungan antara anggota masyarakat dan komponen-komponen pendidikan. Atmosfir pendidikan inklusif tidak dapat terbentuk tanpa dukungan pihak terkait termasuk partisipasi masyarakat. Sikap, nilai-nilai, kepercayaan dari masyarakat terutama orang tua menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

c. Indikator nomor 3 : Teridentifikasinya jenis-jenis dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa dukungan yang selama ini diterima oleh SDN Klender 03 Pagi sebagai penyelenggara pendidikan inklusif relatif kurang, hal ini dapat pada minimnya dukungan yang dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemenuhan akses pendidikan untuk semua. Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk sistem

regulasi atau kebijakan-kabijakan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang jelas mengenai pendidikan inklusif, misalnya dalam bentuk “peraturan pemerintah”. Peraturan menteri, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota, mengenai pendidikan inklusif. Sistem dukungan lain berupa dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga baik tenaga pendidik dan kependidikan yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kerja, atau wadah-wadah profesional, serta lembaga-lembaga non pemerintah.

Dukungan yang langsung dirasakan oleh sekolah adalah pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan baik tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Madya.

Untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, menjadikan kerjasama antara sekolah inklusif dengan SLB dipandang sangat penting. Khususnya dalam pengadaan tenaga guru pembimbing khusus.

Komitmen maupun dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di negara ini sangat besar. Namun dukungan ini baru sebatas komitmen. Dukungan dana dan material lainnya belum sesuai dengan kebutuhan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pembahasan

1. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan sekolah inklusif meliputi : (a) Penerimaan peserta didik baru, meliputi aspek identifikasi, assesmen dan penempatan peserta didik, (b) Program Bimbingan dan Konseling, (c) Pengelompokan belajar peserta didik, (d) Kehadiran peserta didik, (e) Mutasi Peserta didik, (f) Papan Statistik peserta didik yang menggambarkan secara holistic tentang

basis data kepesertadidikan, (g) Buku induk peserta didik.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari hasil penelitian di dapat data bahwa jumlah ABK yang mendaftar cukup banyak namun karena ABK yang mendaftar banyak yang tidak layak didik, membuat sekolah harus menyeleksi siswa ABK tersebut. Agar SDN Klender 03 Pagi dapat memberikan pelayanan maksimal dalam institusinya.

Direktorat PSLB menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggara inklusif memang hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah terdekat. Agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogyanya setiap kelas inklusif dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik⁹¹.

Untuk mengidentifikasi dan menemukan anak dengan kebutuhan khusus, dibutuhkan pengetahuan tentang berbagai jenis dan gradasi (tingkat) kelainan organis maupun fungsional anak melalui gejala-gejala yang dapat diamati sehari-hari.

Alat assesmen merupakan alat penting yang harus dimiliki oleh setiap sekolah inklusif. Alat ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik ABK yang mendaftar di sekolah. Saat ini untuk setiap jenis kekhususan telah tersedia alat assesmennya, seperti alat assesmen untuk anak yang kesulitan dalam bidang penglihatan, alat assesmen untuk anak yang kesulitan pendengaran, alat assesmen untuk anak yang berkesulitan belajar, dan lain-lain. Hasil

dari pelaksanaan assesmen ini selanjutnya dipakai guna menentukan program pembelajaran bagi setiap ABK.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah penyelenggara inklusif melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, saran dan prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan assesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

2. Manajemen Kurikulum

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kurikulum yang digunakan masih sama dengan yang diterapkan pada siswa reguler. Belum ada modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK, termasuk juga penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) tidak dilakukan penyesuaian bagi ABK.

Desain kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif mesti mempertimbangkan dua hal, yakni : karakteristik dan kebutuhan ABK. Penyusunan kurikulum di sekolah inklusif sebaiknya bertujuan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami seoptimal mungkin, dan membantu guru serta orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah atau di rumah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat tiga model pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum sekolah reguler, kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan.

Model kurikulum reguler ABK mengikuti kurikulum umum, sama

seperti peserta didik yang lain di kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan pada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya. Sedangkan pada model kurikulum reguler yang dimodifikasi ABK memakai kurikulum perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum pembelajaran individual. Operasional pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan cara memodifikasi kurikulum umum yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik ABK. Dengan kurikulum modifikasi ini diharapkan ABK dapat mengikuti pembelajaran pada kelas umum secara klasikal bersama dengan peserta didik umum lainnya.

Pada model kurikulum individual ABK memakai kurikulum yang diindividualisasikan, pada format program pembelajaran individual atau PPI. Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, kurikulum ini sering kali di sebut model kurikulum PPI, yang dikembangkan secara khusus oleh guru dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusif. Model kurikulum PPI ini dipersiapkan untuk ABK yang tidak bisa mengikuti kurikulum umum maupun kurikulum modifikasi. Standar kompetensi dalam kurikulum PPI dirumuskan berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh guru pendidikan khusus bersama tim ahli terkait. PPI merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. PPI harus menjadi program yang dinamis, maksudnya sensitive terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, GPK dan peserta didik tersebut dan disusun bersama-sama. Idealnya PPI disusun bersama-sama oleh tim yang terdiri dari Kepala Sekolah,

Komite Sekolah, Tenaga ahli dan Profesi terkait, orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, GPK dan peserta didik yang bersangkutan.

Ketika menyusun PPI hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : berorientasi pada peserta didik; sesuai potensi dan kebutuhan anak; memperhatikan kecepatan belajar masing-masing peserta didik; dan mengejar ketertinggalan serta mengoptimalkan kemampuan ABK. Sedangkan komponen-komponen PPI sekurang-kurangnya terdiri atas : deskripsi tingkat kemampuan ABK sekarang, tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus), rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait, termasuk keaktifan peserta didik dalam berpartisipasi di kelas reguler, sasaran, ketercapaian, metode dan cara mengevaluasinya.

Kegiatan pembelajaran pada model kelas tertentu barang kali berbeda dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di model kelas yang lain. Pada model kelas reguler, bahan belajar antara ABK dengan peserta didik normal mungkin tidak secara signifikan berbeda, tetapi pada model kelas reguler dengan kluster, bahan belajar antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal biasanya berbeda. Bahkan boleh jadi antara sesama ABK juga dapat berbeda. Oleh karena itu perencanaan pembelajaran pada pendidikan inklusif perlu menjadi perhatian penuh dari setiap guru.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah dalam penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasinya. Penyusunan rencana pembelajaran meliputi penetapan tujuan, pengelolaan kelas termasuk dalam hal ini mengatur lingkungan fisik dan sosial,

pengorganisasian bahan/materi, topik yang akan diajarkan pada peserta didik, strategi dan pendekatan kegiatan pembelajaran, alur atau scenario kegiatan pembelajaran, pemakaian sumber dan media belajar, dan penetapan rencana penilaian serta bentuk tindak lanjut selanjutnya yang akan diberikan. Dalam perencanaan pembelajaran di kelas inklusif, perlu diperhatikan hal-hal penting berikut : a. Menetapkan tujuan; b. Merencanakan pengelolaan kelas; c. Merencanakan pengorganisasian bahan; d. Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran; e. Merencanakan penggunaan sumber belajar; f. Merencanakan penilaian.

Tujuan ialah seperangkat kemampuan atau kompetensi tertentu yang akan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pendidikan yang terdapat dalam kurikulum sekolah berpatokan pada Standar Kompetensi keLulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator.

3. Manajemen pembinaan tenaga pendidik

Tidak adanya guru berlatar belakang pendidikan khusus merupakan kendala utama kurang optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi. Berdasarkan penelitian hanya dua guru yang baru mendapatkan pelatihan. Dengan demikian masih perlu adanya pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran kolaboratif secara bertahap, untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Keberadaan GPK bagi sekolah penyelenggara inklusif sesungguhnya sangat penting karena GPK memiliki tugas menyusun instrumen assesmen bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, membangun system

koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua siswa. Memberikan bimbingan kepada ABK sehingga anak dapat dan mampu mengatasi hambatan atau kesulitan dalam belajar, memberikan bantuan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan layanan kepada ABK.

Guru pendamping khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau guru yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa. Untuk kedudukan GPK dari status kepegawaiannya dapat dilihat sebagai berikut : (1) GPK yaitu guru tetap pada SLB/SDLB yang dapat melayani beberapa SD inklusif, (2) GPK adalah guru tetap pada SD reguler, yang bersangkutan mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa, atau latar belakang pendidikan umum namun telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan luar biasa, (3) GPK yaitu guru-guru yang ada pada pusat pengembangan anak, namun lebih banyak berperan sebagai konsultan pendidikan.

Guru atau pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik di sekolah inklusif meliputi : guru kelas, guru mata pelajaran (PAI dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK).

GPK di sekolah inklusif juga bertindak sebagai manajer, yang bertugas mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran ABK di sekolah tersebut.

Intervensi dini adalah tugas GPK untuk mengkoordinasikan layanan dari berbagai aspek yang mengacu pada kebutuhan ABK dan pengaruhnya pada pembelajaran serta kesejahteraan ABK.

Menghilangkan hambatan untuk belajar berarti pula menghilangkan hambatan untuk berhasil. Caranya dengan melakukan kerjasama kolaboratif antara SLB dengan sekolah inklusif.

Seorang GPK selaku manajer diharapkan akan dapat menerapkan berbagai pendekatan untuk memaksimalkan prestasi ABK selama mengikuti pendidikan. Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan guna memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Termasuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. agar tercapai prestasi yang maksimal bukan hanya peserta didik yang harus dikembangkan, tetapi semua sumber daya di sekolah pun perlu ditingkatkan. Termasuk meningkatkan sumber dan media pembelajaran yang tersedia, meningkatkan dan menemukan kepercayaan diri dari orang tua ABK.

Seorang manajer harus berupaya sekuat tenaga memfasilitasi dan memperbaiki hubungan antar sekolah dengan masyarakat dan stakeholdernya. Sekolah bisa bertindak sebagai pusat layanan masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara sekolah dengan masyarakat di sekitarnya. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah melalui pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Jumlah guru reguler pada sekolah penyelenggara inklusif tidak perlu ditambah, tetapi harus disediakan guru pembimbing khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan center. SLB tersebut bisa saja dari SLB Pembina atau SLB terdekat, dan guru sekolah reguler yang dididik dan dilatih untuk menjadi seorang guru yang memahami ilmu pendidikan luar biasa. SLB Pembina ataupun

SLB terdekat dijadikan tempat sebagai pusat assesmen bagi anak yang diduga memerlukan layanan pendidikan khusus. Penempatan layanannya dirujuk

ke sekolah biasa yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

4. Manajemen Pembelajaran

Dari penelitian diperoleh hasil analisis penelitian yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SDN Klender 03 Pagi telah dijalankan dengan sebenarnya, maksudnya peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada waktu dan kelas yang sama tanpa ada pemisahan. Tetapi pada strategi yang digunakan guru mengajar ABK lebih banyak menerima strategi pembelajaran yang sama dengan reguler. Bilapun ada perhatian akan kekhususannya seperti strategi khusus, masih minim diterima peserta didik berkebutuhan khusus dan dilakukan oleh guru.

Inti implementasi pendidikan inklusif ada pada proses pembelajaran di kelas yang melibatkan sejumlah ABK di kelas. Tak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan dan kelulusan sedikit banyak dipengaruhi oleh mutu kegiatan pembelajaran. Dan sebagian besar proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah inklusif mengikuti proses pembelajaran sekolah reguler.

Mengikut sertakan ABK di sekolah umum di Indonesia sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 002/U/1986, yang intinya adalah program layanan penuntasan wajib belajar bagi peserta didik yang memiliki cacat netra atau tunanetra untuk belajar bersama dengan rekan-rekannya di sekolah-sekolah umum. Program layanan ini kemudian dikenal dengan sistem integrasi.

Pada sistem pendidikan inklusif sekolah berusaha melayani peserta didik-peserta didik ini dengan menyesuaikan pada kebutuhan dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang ada. Bentuknya adalah peserta didik

berkebutuhan khusus memiliki program pembelajaran sendir-sendiri atau individual yang dikenal sebagai PPI. Pada proses pembelajaran, layanan yang diberikan pada ABK berbeda dengan layanan bagi peserta didik lainnya. Termasuk perbedaan dengan system penilaiannya. Tetapi yang mesti dipahami oleh setiap pengelola sekolah inklusif adalah melaksanakan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan karakteristik ABK, melaksanakan proses pembelajaran yang ramah bagi setiap peserta didik, dan lakukan proses penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran bagi ABK.

Pembelajaran di sekolah inklusif menuntut guru untuk menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua perbedaan pada peserta didik. Prinsip-prinsip ini secara umum dibagi dalam dua bagian, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum pembelajaran ABK antara lain motivasi, latar atau konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan dan memecahkan masalah. Sedangkan prinsip-prinsip khusus pembelajaran bagi ABK tergantung pada jenis kekhususan ABK itu sendiri.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada proses pembelajaran di SDN Klender 03 Pagi menunjukkan bahwa sebagian besar guru di sekolah inklusif ini tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Padahal penggunaan prinsip-prinsip pembelajaran bagi ABK di sekolah inklusif merupakan salah satu karakteristik dalam sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman maupun keterampilan guru di sekolah inklusif ketika membelajarkan peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya menjadi indikator utama

kekurangberhasilan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor lainnya adalah ketidakadaan GPK di sekolah inklusif. Tidak ada GPK di sekolah inklusif ini berandil besar melemahkan proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas atau pada sekolah inklusif.

5. Manajemen Penilaian

Dari hasil penelitian diketahui evaluasi hasil belajar yang dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan guru saja sebab tidak ada standar khusus yang mengatur hal ini. Walaupun bentuknya serupa, bobot penilaiannya dan juga standar penilaian bagi ABK diturunkan dengan pertimbangan kemanusiaan ataupun agar ABK tidak tinggal kelas. Begitu pula pada penyusunan rencana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik reguler. Sedangkan dalam penyusunan instrument evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan model pelaporan hasil kepada orang tua dibedakan dengan peserta didik reguler.

Demikian pula pada pemberian tugas, umumnya ABK diberikan tugas yang sama tetapi dinilai dengan standar yang berbeda. Alasan yang diberikan sekolah adalah untuk penyesuaian. Namun penyesuaian yang dilakukan tidak didasarkan pada kebutuhan ABK, misalnya dengan PPI. Dengan demikian, yang dilakukan oleh sekolah masih belum dapat dikatakan tepat.

Pada penilaian ABK di SDN Klender 03 Pagi, selama ini penilaian hasil belajar ABK memakai pola yang berbeda dengan proses penilaian pada peserta didik reguler lainnya walaupun peserta didik di sekolah inklusif memakai kurikulum yang sama. Perbedaan perlakuan ini ada pada dua hal, yaitu kepada semua peserta didik diberikan naskah soal yang sama, namun bagi ABK pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)-nya diturunkan, dan

yang ke dua semua peserta didik diberikan KKM yang sama, tetapi bagi peserta didik berkebutuhan khusus bobot soal diturunkan.

Permasalahannya tidak semua sekolah inklusif memakai sistem penilaian yang seragam. Sebagian besar sekolah inklusif memperlakukan peserta didik berkebutuhan khususnya sama dengan peserta didik lainnya.

Setelah terbit Permendiknas nomor 70 tahun 2009, system penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dibandingkan dengan system penilaian sebelumnya. Dalam Permendiknas disebutkan dengan jelas bahwa sistem bagi ABK memakai penilaian yang ditetapkan oleh sekolah inklusif yang bersangkutan. Pada pasal 9 ayat 1 tertera : "Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan". Dan yang dimaksud kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pasal 9 ayat 1 tersebut adalah kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah, dalam hal ini sekolah inklusif yang bersangkutan.

Ada dua kemungkinan kurikulum yang dapat dikembangkan oleh sebuah sekolah inklusif. Pertama kurikulum yang dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, ke dua kurikulum yang dikembangkan tidak mengacu pada standar nasional pendidikan. Jenis kurikulum ke dua sering disebut sebagai kurikulum yang dimodifikasi. Selanjutnya didukung ayat 3 yang berbunyi: "Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti uji yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan". Maksudnya peserta didik pada sekolah inklusif yang memakai kurikulum yang dimodifikasi tidak wajib mengikuti ujian nasional.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan tempat ABK tersebut menamatkan pendidikannya. Dan bagi peserta didik yang mendapatkan surat tanda tamat belajar tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

6. Manajemen Pembiayaan

Hasil penelitian pada bidang ini, peneliti mendapat hasil bahwa sekolah kekurangan dana dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebab sebagai sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan biaya tambahan. Baik biaya tambahan pada saat proses pembelajaran maupun penilaian pada hasil belajar. Begitupun dalam proses pembelajaran dibutuhkan bahan dan media pembelajaran khusus, juga pada saat penilaian dibutuhkan modifikasi pada alat-alat evaluasi, yang pastinya memerlukan biaya tambahan.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pada pasal 62 dikatakan: "Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal". Biaya

investasi satuan pendidikan antara lain biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan terdiri dari (1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Dalam kebijakan pembiayaan sekolah dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya itu diperoleh dan dialokasikan. Dengan menelaah berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita dapat menarik kesimpulan konsekuensi terhadap pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) siapa yang akan dididik dan berapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan; (2) bagaimana

mereka akan dididik; (3) siapa yang akan membayar biaya pendidikan; dan (4) sistem pemerintahan yang mendukung pembiayaan sekolah.

Ukuran bagi biaya pendidikan acap kali menitikberatkan pada ketersediaan dana yang ada, tetapi secara bersamaan kerap kali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal guna mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan

biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapa Negara bagian Amerika Serikat dalam mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai study di Indonesia telah dicoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standar kecukupan.

Biaya Operasional Sekolah (BOS) merupakan sumber utama penerimaan dalam APBS di SD dan SMP termasuk di sekolah SD dan SMP inklusif. Sasaran BOS adalah semua SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan salafiyah setara SD dan SMP (termasuk sekolah keagamaan non Islam), baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Selain BOS, sekolah menerima dana dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yang dikenal dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Besar dana yang diterima dari pemerintah daerah tergantung pada kemampuan finansial daerah masing-masing. Penggunaan dana BOS dan BOP harus berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah/Madrasah.

BOP dan BOS bertujuan membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa. Akan tetapi sekolah tetap dituntut mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dari sebuah penelitian tentang efektifitas biaya pendidikan dalam pendidikan inklusif pada tahun 1989 menemukan bahwa selama lebih dari limabelas tahun, angka bekerja untuk lulusan sekolah menengah atas yang memiliki kebutuhan khusus yang ditempatkan pada program yang terpisah yaitu 53 %. Namun untuk lulusan sekolah menengah yang memiliki kebutuhan khusus yang ditempatkan pada program yang disatukan, angka bekerjanya mencapai 73%. Kemudian, pada biaya mendidik siswa dalam program yang terpisah atau segregasi besarnya mencapai dua kali lipat dari

biaya mendidik siswa dalam program inklusif.

Penelitian yang dilakukan Affleck, Madge, Adams, dan Lowenbraun (1988) menunjukkan bahwa kelas yang mengintegrasikan peserta didik reguler dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus biaya yang dikeluarkan lebih efektif daripada kelas pada program segregasi atau terpisah. Namun demikian pencapaian prestasi dalam membaca, matematika, dan bahasa di kedua program tersebut hampir sama.

7. Manajemen Sarana dan Prasarana

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan bagi semua peserta didik normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam kelas yang sama.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN Klender 03 Pagi belum memadai, bahkan sama sekali tidak memiliki sarana dan prasarana khusus. Padahal konsekuensi dari pelabelan sekolah sebagai sekolah penyelenggara inklusif menuntut adanya penyesuaian strategi pembelajaran sebagai upaya melaksanakan kurikulum yang telah disahkan secara nasional.

Pengelolaan sarana dan prasarana khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan secara terpadu oleh guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas, dan tim dari berbagai profesi yang terkait seperti dokter mata, psikolog, ahli pendidikan luar biasa, ahli olahraga anak luar biasa, sosial worker, konselor, dokter ahli THT, ahli terapi wicara, neurology, dokter spesialis anak, dokter orthopedic, fisioterapis, okupasional terapis, ahli bahasa dalam hal ini ahli remedial bahasa/menulis sesuai jenis dan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Penggunaan sarana dan prasarana sifatnya fleksibel, maksudnya tidak dikhususkan untuk setiap anak dan tiap bidang pengajaran. Tetapi dapat dipakai oleh anak-anak lain dan pada bidang studi yang berbeda juga dalam kelas yang berbeda. Jadi dalam penggunaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan kreativitas pengelola dalam menentukan jenis alat serta tujuan penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

8. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dalam membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Klender 15 Pagi sudah cukup bagus. Hanya saja kurangnya sosialisasi menyebabkan persepsi dan pemahaman masyarakat sekitar masih terdapat pro dan kontra. Hal lain yang menyebabkan timbulnya persepsi demikian adalah kurangnya dukungan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam membantu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hakekatnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Diharapkan penyelenggara pendidikan di setiap daerah mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peran serta masyarakat pada *penyelenggaraan pendidikan inklusif* antara lain pada bidang: perencanaan, penyediaan tenaga ahli atau tenaga professional yang dibutuhkan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, pendanaan, pengawasan, dan penyaluran lulusan.

Pemahaman masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan data hasil penelitian

yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pengelola pendidikan di satuan pendidikan masih kurang memahami tentang sistem pendidikan inklusif. Masih kurangnya pemahaman tentang sistem pendidikan inklusif di kalangan praktisi pendidikan baik di tingkat dinas maupun di tingkat satuan pendidikan, menyebabkan perkembangan pendidikan inklusif sangat lambat. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, pemahaman terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif masih minim. Pemahaman yang lebih mendalam hanya ditemukan di kalangan akademisi dan di pusat-pusat kajian pendidikan inklusif pada pusat kebijakan.

Selama ini masyarakat masih menanggapi tentang sekolah inklusif ini ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sistem pendidikan inklusif adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum atau sekolah reguler, yang diyakini sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah bagi penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. tetapi, sangat disayangkan system ini belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia walaupun sistem pendidikan ini telah dilaksanakan di beberapa Negara maju dan berhasil.

Dibutuhkan usaha serius guna mensosialisasikan sistem pendidikan inklusif ini kepada masyarakat luas. Partisipasi anggota masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat juga amat penting dalam membantu *mengembangkan pendidikan inklusif ini*. Amat dibutuhkan hubungan antara anggota masyarakat dengan berbagai komponen pendidikan, sebagai pembentuk atmosfer pendidikan inklusif. Pembentukan atmosfer pendidikan ini tidak dapat terbentuk bila tidak didukung oleh berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat. Sikap, nilai-nilai, kepercayaan masyarakat

terutama orang tua menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kendala-kendala implementasi pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi:

Kendala dalam melakukan identifikasi siswa ABK ketika penerimaan peserta didik baru.

Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan selektif dan berdasarkan inisiatif guru serta dengan mempertimbangkan tidak adanya GPK di sekolah ini, sehingga kuota kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah ini tidak maksimal.

Kendala dalam melaksanakan Kurikulum sekolah inklusif.

Kurikulum yang dipakai masih sama dengan kurikulum yang dipakai bagi siswa reguler. Tidak ada modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Termasuk dalam penyusunan PPI bagi ABK juga tidak dilakukan.

Kendala dalam manajemen penyediaan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga pendidik di sekolah.

Tenaga pendidik yang ada kurang pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing ABK dalam kegiatan belajarnya. Sekolah ini tidak diperkuat dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK), maupun dukungan tenaga ahli. Tidak adanya guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi.

Kendala pada proses pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai keragaman kelainan baik kekhususan dalam hal fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis yang menjadikan strategi

pembelajarannya perlu disesuaikan. Strategi pembelajaran di SDN Klender 03 Pagi menjadi kendala sebab tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

Kendala pada manajemen pendanaan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, terkait dengan beberapa sarana dan prasarana maupun biaya operasional tambahan lainnya. Dana yang diterima dari pemerintah sama dengan dana yang diberikan pemerintah pada sekolah reguler.

Kendala dalam manajemen sarana dan prasarana ketersediaan sarana dan prasarana khusus sekolah inklusif.

Sarana dan prasarana umum di SDN Klender 03 Pagi telah tersedia, akan tetapi sarana dan prasarana khusus belum tersedia.

Kendala dalam sistem dukungan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, baik lembaga internal, eksternal maupun kemasyarakatan.

Secara kelembagaan lembaga-lembaga ini dikenal baik oleh sekolah. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa sekolah hampir tidak mengenal keberadaan dan peran lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi.

Faktor-faktor pendukung peningkatan pendidikan inklusif di SDN Klender 03 Pagi:

Dukungan dari bapak dan ibu guru, serta karyawan dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan bimbingan-bimbingan maupun layanan seperti peserta didik yang lainnya.

Dukungan peserta didik normal dalam menerima kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus ketika belajar maupun diluar jam belajar, bahkan

menolong, mengajak dan memperlakukan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut sama dengan teman lainnya.

Dukungan masyarakat sekitar, yang agamis yang menganggap dan menerima anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari ciptaan Allah swt yang harus diterima dengan ikhlas.

Dukungan dari pemerintah, yaitu dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Provinsi yang telah memberikan bantuan meskipun masih sangat minim.

Ruang belajar atau ruang kelas serta lapangan upacara/tempat olahraga yang standard dan memadai.

Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Kesimpulan

1. Manajemen Kesiswaan

Ciri khas dari sekolah inklusif adalah pada identifikasi/asesmen anak berkebutuhan khusus (ABK), namun di sekolah ini proses identifikasi pada peserta didik berkebutuhan khusus tersebut tidak dilakukan secara akurat dan tidak dilakukan oleh tenaga terlatih atau profesional di bidangnya, sehingga tujuan identifikasi anak berkebutuhan khusus supaya mendapatkan program yang objektif dan sesuai dengan kekhususannya tidak tercapai. Proses penerimaan siswa baru pada sekolah ini didasarkan pada wawancara dan diputuskan dengan pertimbangan peserta didik tersebut adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang dianggap layak.

2. Manajemen Kurikulum

Kurikulum yang digunakan pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan pedoman yang seharusnya dan kurikulum tersebut bukan kurikulum modifikasi. Tidak adanya Program Pengajaran Individual (PPI) merupakan bukti tidak dipakainya kurikulum yang sesuai. Walaupun sekolah menyatakan

materi bagi ABK dikurangi atau melakukan modifikasi tetapi dasarnya bukanlah asesmen (yang tertuang dalam PPI), melainkan lebih pada perkiraan pihak sekolah atau guru. Sesungguhnya sekolah telah paham bahwa penyusunan kurikulum sepenuhnya diberikan pada sekolah masing-masing yaitu dalam Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mungkin sekolah memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya. Tetapi kurikulum di SDN Klender 03 Pagi sebagai sekolah penyelenggara inklusif tidak dirancang atas dasar keberagaman peserta didik dan lebih menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran.

3. Manajemen Pendidikan dan Kependidikan

Kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah inklusif ini cukup baik. Guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif terhadap keberadaan peserta didiknya yang berkebutuhan khusus. Hanya saja mereka belum memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai dalam membimbing ABK dalam kegiatan belajarnya sehingga kurang tepat dalam mengatasi peserta didik berkebutuhan khusus. hal ini akan dapat diatasi bila di sekolah ini mempunyai guru pembimbing khusus yang secara definitif ditugaskan di SDN Klender 03 Pagi. Kelangkaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif ini disebabkan oleh ketidakjelasan proses perekrutan guru di setiap daerah sehingga sekolah kesulitan dalam pengadaan guru pembimbing khusus. padahal keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif akan sangat membantu terselenggaranya pendidikan inklusif menjadi lebih baik.

4. Manajemen Pembelajaran

Proses pembelajaran di SDN Klender 03 Pagi belum menunjukkan

proses pembelajaran yang menghargai perbedaan setiap peserta didik berkebutuhan khususnya dimana proses pembelajarannya tidak direncanakan sesuai dengan kekhususan mereka. Model kurikulum yang digunakan juga masih model kurikulum yang diperuntukkan bagi peserta didik reguler, tanpa ada modifikasi. Sedang Program Pembelajaran Individual (PPI) tidak selalu dibuat bagi peserta didik berkebutuhan khusus. PPI dibuat hanya oleh satu guru, itu pun hanya disusun satu kali saja dalam satu semester. Ini dilakukan karena guru yang dipercaya menangani peserta didik Inklusif u kelas 1 dan juga mengajar bahasa Inggris mulai dari kelas I sampai kelas VI.

5. Manajemen Penilaian

Sistem penilaian bagi ABK juga masih memakai sistem penilaian yang sama dengan peserta didik reguler. Perbedaannya adalah bagi peserta didik berkebutuhan khusus diberikan Standar Kelulusan Minimal (SKM) yang lebih rendah dibandingkan dengan standar kelulusan minimal yang ditentukan bagi peserta didik normal. Ketidak-fahaman guru terhadap sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas bagi ABK menyebabkan guru mengambil kebijakan dalam penilaian bagi ABK yang tidak sama seperti peserta didik yang normal. Pada sekolah inklusif ini sistem pelaporan yang diberikan kepada orang tua menggunakan dua sistem, maksudnya kepada orang tua ABK selain diberikan laporan seperti yang diberikan pada peserta didik reguler, juga diberikan laporan individual. Laporan individual ini berisikan laporan kemajuan hasil belajar ABK yang disusun secara deskriptif dan diberikan kepada orang tua peserta didik berkebutuhan khusus.

6. Manajemen Pembiayaan

Sumber pembiayaan di sekolah inklusif ini keseluruhannya berasal dari pemerintah, yaitu pemerintah pusat dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Hampir-hampir tidak ada kontribusi dana yang berasal dari orang tua peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan dana yang lebih besar daripada penyelenggaraan pendidikan reguler akan tetapi masih lebih murah jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Alokasi biaya pada penyelenggaraan pendidikan inklusif digunakan untuk gaji atau honor guru, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan alat bantu dan media pembelajaran khusus, dan lain-lain.

7. Manajemen Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana di SDN Klender 03 Pagi belum memadai baik dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya, juga dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana sekolah inklusif karena sesungguhnya sekolah ini mulanya adalah sekolah umum yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif, sehingga sarana dan prasarana yang tersedia merupakan sarana dan prasarana sekolah umum. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah, pada hakekatnya dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

8. Manajemen Pemeberdayaan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum optimal. Pihak sekolah belum mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang kompeten dan berkomitmen tinggi terhadap implementasi pendidikan inklusif. Pihak terkait itu adalah komite

Sekolah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) seperti yayasan-yayasan pendidikan, dan peran perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan banyak dukungan agar dapat berhasil dengan baik, sayangnya SDN Klender 03 Pagi tidak mengenal eksistensi dan peran lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan pendidikan inklusif di sekolah. Komite Sekolah sudah berusaha mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan tetapi pemahaman masyarakat yang rendah menyebabkan keberadaan Komite Sekolah seringkali menimbulkan masalah dan memicu protes orang tua murid bila diminta partisipasi berupa dana sebagai usaha mengurangi beban sekolah.

Implikasi

1. Manajemen Kesiswaan.

Proses identifikasi dan asesmen yang tidak akurat memberi dampak pada tidak obyektif dan tidak sesuai layanan pendidikan yang diberikan sekolah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena identifikasi dan asesmen merupakan acuan dalam menyusun rancangan program pembelajaran termasuk kurikulum, sarana, media dan strategi dalam proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2 Manajemen Kurikulum.

Kurikulum yang tidak dirancang atas dasar keberagaman peserta didik dan cenderung menitik-beratkan pada penguasaan materi pelajaran berdampak pada: (a) konsentrasi, rasa percaya diri dan atensi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi berkurang, sehingga potensi dan kemampuan belajar yang telah dikuasai tidak dapat terwujud optimal, (b) peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama agar dapat menyesuaikan diri dengan soal-soal yang baru dikenalnya,

(c) motivasi dan semangat peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti ujian menurun karena mendapat soal ujian yang belum dipahami, (d) peluang bagi peserta didik untuk mencapai standar kelulusan relatif. Modifikasi (penyesuaian) kurikulum yang dilakukan tidak melibatkan guru pendidikan khusus, konselor, psikolog dan ahli lain yang terkait mengakibatkan kurikulum tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus dan lebih terlihat menitikberatkan pada penguasaan materi pelajaran.

Manajemen Pembinaan Tenaga Pendidik.

Kekurangmampuan guru dalam melayani ABK berdampak pada rendahnya kualitas layanan yang diterima peserta didik berkebutuhan khusus dari guru atau sekolah yang bersangkutan. Ketidakmampuan guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru-guru dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus tersebut yang belum optimal. Kepala sekolah kesulitan untuk mendapatkan guru pembimbing khusus yang dibutuhkan untuk mengelola pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya, karena terkait dengan dana yang harus dikeluarkan.

Manajemen Pembelajaran.

Program pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Penggunaan kurikulum umum pada kelas inklusif memaksa peserta didik berkebutuhan khusus untuk memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kurikulum yang digunakan. Proses pembelajaran

yang dilakukan di sekolah belum sepenuhnya menginterpretasikan proses pembelajaran yang bersifat individual. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas inklusif tidak berbeda dengan kelas reguler.

5. Manajemen Penilaian.

Sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas yang berlaku di sekolah inklusif sangat beragam. Di sekolah inklusif yang menggunakan sistem evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan yang digunakan pada peserta didik normal, dapat dipastikan akan banyak peserta didik yang tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan. Hal serupa ketika kenaikan kelas, bila sistem kenaikan kelas berdasarkan mental age, maka di sekolah itu pasti banyak peserta didik yang tinggal kelas.

6. Manajemen Pembiayaan.

Minimnya dana bagi penyelenggara pendidikan inklusif dapat berdampak pada: (a) tidak ada dana untuk menggaji guru pembimbing khusus, (b) tidak efektifnya proses asesmen, pembelajaran, dan modifikasi pada alat-alat evaluasi, (c) pengadaan sarana dan prasarana khusus dan pengadaan alat peraga khusus, (d) menurunnya semangat kerja gur-guru karena bertambahnya beban tidak diimbangi dengan insentif yang diperoleh.

7. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan akan berdampak pada: (a) tidak terwujudnya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik dalam kelas, (b) menurunkan minat orang tua mendaftarkan anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Bila mengacu pada standar sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu standar dari delapan standar nasional

pendidikan maka sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SDN Klender 03 Pagi hingga saat ini belum terpenuhi. Belum terpenuhinya standar tersebut dikarenakan semula SDN Klender 03 Pagi adalah sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki dan tersedia sama dengan sarana dan prasarana pada sekolah reguler lainnya.

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.

Ketidakjelasan sistem dukungan terhadap pendidikan inklusif berdampak pada: (a) lambannya pengembangan pendidikan inklusif dan lemahnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, (b) tidak ada arahan yang jelas bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dilaksanakan. Sejak dicanangkannya pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua tahun 2003 sampai sekarang, pengembangan pendidikan inklusif belum menunjukkan perkembangan berarti.

Saran-saran

Rancangan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar (learning needs) peserta didik.

Penyusunan rencana program pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik kelas pada sekolah inklusif.

Agar diupayakan peningkatan kompetensi paedagogik dan kompetensi professional guru-guru dan karyawan di sekolah inklusif dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif.

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif mesti ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Dukungan masyarakat, orang tua dan stakeholder lainnya perlu dibina dan ditingkatkan dengan sungguh-sungguh.

Perangkat hukum bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang setingkat dengan peraturan pemerintah perlu diperbaiki.

Memberikan masukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kopertis untuk memasukkan mata kuliah mengenai pendidikan luar biasa dalam mata kuliah disemua Fakultas Kependidikan sehingga tenaga pendidika yang akan lulus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Meminta pemerintah memberikan penghargaan dengan mengangkat guru honor yang membantu terlaksananya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah inklusif sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian diri yang dengan tulus dan ikhlas, walaupun pendapatan perbulannya di bawah UMR.

Untuk mengatasi kurang atau tidak adanya guru pembimbing khusus di sekolah inklusif, peneliti mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka program pendidikan luar biasa dengan waktu pendek (dalam satu atau dua semester) bagi semua guru-guru yang tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa dan diberikan diluar kegiatan mengajarnya.

Implementasi pendidikan inklusif perlu dikaji terus melalui penelitian-penelitian berbagai pihak terkait agar penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi lebih baik, terutama pengkajian pada proses pembelajaran di kelas.

Daftar Pustaka

Arikunto Suharsimi, 1986, *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta: Rajawali Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta Asep Herry

- Heriawan, dkk, 2003, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Asep Sudarsyah & Diding Nurdin, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Bandi Delphie, 2006, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Bandung : PT. Refika Aditama
- , 2006, *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inlusi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Dadang Suhardan & Nugraha Suharto, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Daryanto, M, 2011, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Rineka
- Cipta David S., 2012, *Sekolah Inklusif : Konsep, Penerapan dan Pembelajaran*, Bandung: Nuansa Cendikia
- Engkoswara & Aan Komariah, 2011, *Administrasi Pendidikan*, Cetakan ke dua, Bandung: Alfabeta
- Foreman, P., 2002, *Integration and Inclusion*, Australia: Thomson Learning
- Gavin Reid, 2005, *Dyslexia and Inclusion: Classroom Approaches for Assesment, Teaching, and Learning*, London: David Fulton Publisher
- Ibrahim Bafadal, 2008, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jamaris Martini, 2010, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Penamas Murni
- Kemendiknas, 2010, *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Made Pidarta, 2011, *Manajemen Pendidikan Indonesia*,

- Edisi Revisi 2011, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mangunsong, F., 1998, *Psikologi dan pendidikan Anak Luar Biasa*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI.
- Moeleong Lexy. J., 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mohammad Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Fathi, 2007, *The art of leadership of Islam. Meneladani kepemimpinan Nabi & Khulafa Rasyidin*, Jakarta: Khalifa
- Mulyasa, E., 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Rosdakarya
- _____, 2011, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Cetakan ke sebelas, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____, 2011, *Manajemen Berbasis Sekolah –Konsep, Strategi dan Implementasi*, Cetakan ke tiga belas, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ngalim Purwanto, M. & Sutardji Djojopranoto, 1991, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara
- Sumber Widya Oemar Hamalik, 2010, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Oteng Sutisna, 1989, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Percetakan Offset Angkasa
- Patton, MQ, 1983, *Qualitative Evaluation Method*, Beverly Hills: Sage Publication
- Praptono, 2001, *Sinopsis Disertasi: Kondisi Adaptasi Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan diri dan Prestasi Belajar Siswa Tunanetra dan Tunarungu di Provinsi DKI Jakarta: Program Pasca Sarjana UNJ*
- Robert C. Bogdan and Sari Biklen, 1992, *Qualitative research for Education: A Theory and Method*, London: Allyn and Bacon Inc.
- Rohiat, 2010, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik, Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan - Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Stubbs Sue, 2008, *Inclusive Education – Where there are few resources*. Oslo: The Atlas Alliance.
- Uhar Suharsaputra, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Wirawan, 2011, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Manusia (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Yati Siti Mulyati & Aan Komariah, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen,
- Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan*

- Inklusif: Manajemen Sekolah*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Pengembangan Kurikulum*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Penilaian*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kebutuhan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dirjen mandikdasmen, Depdiknas, 2007, *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kegiatan Pembelajaran*, Jakarta Direktorat Pembinaan SLB, *Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusif*. info@ditplb.or. <http://www.ditplb.or.id> Depdiknas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 2008, *Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa* Unesco, 1994, *The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education*, Paris: Author Terry Irenewaty dan Aman, *Penelitian, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*. <http://www.scribd.com/doc/52167705> Endis Firdaus, 2010, *pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia*. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195703031988031-ENDIS_FIRDAUS/Makalah_Pro_internet/Inkls_Seminar.pdf SDN Klender 03 Pagi, *Profil SDN Klender 03 Pagi 2012/2013*, Jakarta. Sunaryo, 2009, *Makalah: Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jurusan PLB FIP UPI. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR_PEND_LUAR_BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusif.pdf